

Model pemolisian

by Siti Marwiyah

Submission date: 19-Jan-2020 09:17PM (UTC+0800)

Submission ID: 1243596884

File name: model_pemolisian_1.doc (156.95K)

Word count: 23061

Character count: 35611

MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PEMBALAKAN HUTAN

Siti Marwiyah Faku Itas Huku
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

syyet@yahoo.co.id

Abstract The impact of illegal logging is quite alarming, because it could threaten the survival of the nation and the state. To address this, the police personnel are inadequate in number. For example, a large area that requires maximum protection, so that with a limited number of officers, it is not possible to provide maximum protection or security. Community policing is the right step to tackle illegal logging. The presence of the role of the community to maintain or protect the forest will make a minimal so that mean to do logging will be dealing directly with the public.

Keywords: illegal logging, police, community

Abstrak Dampak ilegal logging sudah tergolong memprihatinkan, karena bisa mengakibatkan hilangnya bangsa dan negara. Untuk menanggulangi ini, personil aparat kepolisian tidak lah memadai jumlahnya. **Contoh** kawasan hutan merupakan kawasan luas yang membutuhkan perlindungan maksimal, **sehingga dengan jumlah aparat yang terbatas ini, tidak mungkin bisa** memberikan **perlindungan atau pengamanan** maksimal. **Pemolisian masyarakat** merupakan langkah tepat untuk menanggulangi **ilegal logging**. Kehadiran peran masyarakat untuk menjaga atau melindungi kawasan hutan akan membantu pejabat yang bermaksud melakukan pembalakan hutan akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat.

Kata Kunci: ilegal logging, polisi, masyarakat

A. Pendahuluan Adasuatupernyataan berbunyi *state without forest* atau negara tanpa hutan, yang digunakan menggambarkan keadaan hutan di Indonesia yang sedang dalam kondisi memprihatinkan akibat ulah liar manusia manusia yang tidak bertanggung jawab yang eksploitasi, membakar, mengunduli, atau membalak nya..

Julukan negara tanpa hutan memanggulkan tidak mungkin akan layak diandang oleh negara ini, karena ulahtidakramahdantidakber

keadaban terhadaphutanterusberlangsung dari waktu ke waktu, sementara upaya rehabilitasi hutan tidak pernah dilakukan atau kalau dibandingkan cepatnya kerusakan akibat sakyang menghancurkan kawasan sumberdaya hutan. Kerusakan hutan yang terus berlangsung ini bahkan akan potensial membahayakan ini menujutu yang-tu yang (Imam Kabil, 2007 : 2).

Kelangsungan hidup manusia di planet bumi ini menjadi perhatian manusia dunia. Heriyanto, yang mengutip pernyataan Direktur

eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) menyebutkan: dunia kita berada di tepi kehancuran lantaran ulah manusia. Di seluruh planet, sumber sumbu alam dijarah tanpabat as. Pada detik, diperkirakan sekitar 200 ton karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer dan 750 ton fosil fosil. Sementara itu, diperkirakan sekitar 47.000 hektar hutan dihabiskan, 16.000 hektar tanah digunduli, dan antara 100 hingga 300 spesies mati setiap hari. Pada saat yang sama, secara absolut jumlah penduduk meningkat 1 miliar orang per dekade. Hal ini menimbulkan beban bumi yang sudah berat (Ahmad Zarkasi, 2010: 17).

Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014 Model Pemolisian Masyarakat sebagai . . . 57

Kekayaan hutan Indonesia sebenarnya merupakan sumber daya bangsa ini. Dari kekayaan ini, kita bisa bercerita kepada anak cucu dan masyarakat manca negara, bahwa sumber daya alam negerinya adalah cermin bangsa makmur dan subur di dunia. Sayangnya kekayaan hutan ini cenderung akan tinggal jadi cerita, legenda, dan untai kata manis di buku-buku pelajaran sekolah. Mengapa demikian? Ulah pembalakan hutan telah menjadikan sumber daya strategis ini terancam habis atau tinggal jadi catatan sejarah.

Akibatulah pembalakan ini, bencana alam terjadidimana-mana. Bencanaalam yang menjadirealitas di setiap musim hujan, salah satu faktor utamanya berelasi dengan problem pembalakan hutan. Persoalannya, mengapa dengan resiko atau dampak komplikatif yang menimbulkan masyarakat dan bahkan menjadikancamankedepan bagikelangsungan hidup bangsa ini pembalakan hutan masih terjadi.

B. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legispositivis yang menyatakan bahwa hukum adalah ide ntik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandangkan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat ototonom, terutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Tradisi Bencana

Selain berakibat terhadap terjadinya bencana alam, ialah brutal dan barbar sebagai orang yang menggunduli hutan atau populer disebut *illegal logging* itu telah mengakibatkan negeri ini kehilangan sumberdaya utamanya. Hutan menjadi gundul dan tidak lagi menghembuskan angin kesejukan dan keramahan akibat dibabat dan dibakar oleh tangan-tangan kotor (*the dirty hands*) yang mengumbar ambisi menumpuk

materi dan keserakahannya.

WALHI (2010) menginginkan atkan bahwa hutan Indonesia beradalam kondisi krisis dan sangat mengkhawatirkan. Pembalakan hutan baik yang legal maupun illegal tidak terkontrol dan telah mengakibatkan kerusakan hutan yang masif di hampir seluruh kawasan hutan Indonesia. Longgeng Ginting, Direktur eksekutif WALHI menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia mengukuh bahwa tingkat deforestasi saat ini telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun, meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Ini berarti Indonesia kehilangan hutannya seluas 7,2 hektar setiap menitnya (Mutiarasalama, 2012: 2).

Dampak pembalakan hutan yang merusak tersebut tidak saja telah mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, hancurnya habitat-habitat satwa endemik serta semak in

merosotnya kualitas sumber daya Indonesia, namun juga menghasilkan seribencana ekologi di seluruh Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang meregang utratusan korban jiwa setiap tahunnya. Iorinisnya lagi, kehidupan lebih dari 40 juta masyarakat adat dan lokal yang hidupnya tergantung langsung sumber daya hutan terus memburuk dan miskin akibat kehancuran hutan tersebut.

Dalam ajaran agama juga sudah digariskan, bahwa Tuhan tidak pernah melarang hambanya untuk memanfaatkan kekayaan hutan. Tuhan sudah menganugerahkan nikmat besarnya ini demi mengantarkan masyarakat dalam kemakmuran. Tuhan menyuburkan hutan dengan segala isinya supaya masyarakat bisa mengamalkan manfaatnya.

Tuhan sudah demikian Pemurah dan Penyayang dengan menyediakan sumber daya yang memadai untuk menopang kebutuhan hidup manusia. Kekayaan hutan telah dipersembahkan Nyaselainsebagai buktike agungan Kekuasaan Nyak epadamanusia dan makhlukhiduplainnyadi jagad raya, juga sebagai modal besar bagi keberlanjutan dan pencerahan hidup manusia. Sayangnya, manusia salah dalam menyikapidan memperlakukananugerah Tuhan. Kekay

58 *Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014 Model Pemolisian Masyarakat sebagai . . .

aan hutan telah dijadikan sebagai obyek untuk dieksploitasi sejalan dengan selera atau target-targetnya (Imam Kabul, 2007: 3-4). Kepentingan mencari dan memperburuk keuntungan lewat pemanfaatan hutan lebih diutamakan dibandingkan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hutan. Akibatnya, hutan menderita dan berpenyakit. Gundulnya hutan dan keroposnya kekuatan penyangga adalah bukti penderitaannya yang dilalui oleh hutan.

Hutan yang sedang berpenyakit ini tidak kuat menahan diri, apalagi dalam kondisi sedang memilik ini, manusia tetap saja merasakalau kezaliman atau ketidak-adaban terhadap hutan harus dilanjutkan. Karenasudah tidak kuat menahan penderitaan atau sakit berlarut-larut ini, akhirnya hutan menerimapasrah ketika airdantanah menyemburkan kekuatan dahsyatnya atau dengan kondisi yang rentan, hutan tidak cukup punya kemampuan untuk menahan amuk airdantanah, yang diantaranya berwujud banjir bandang, tanah longsor, dan bencana lain yang mengerikan.

Manusia Indonesia saat ini sedang dikritik oleh hutannya yang telah digunduli dan dirusaknyasendiri. Mereka berkali-kali diingatkan secara radikal (melalui benca na) tentang sikap dan perbuatannya yang biadab dan keji terhadap hutan, yang mengakibatkan hutannya ban gsa Indonesia ini menjadi merana (Mut iara Salma, 2012: 12). Tidak pernah ada stigma manusia ben ca na di setiap musim hujan, jika di tengah masyarakat sudah tidak ada atau berkurang banyak penjahat keji yang melakukan kriminalisasi terhadap hutan.

2. Reduksi Fungsionalisasi Hutan Kriminalisasi hutan merupakan an

bukti reduksi fungsionalisasi hutanyang dilakuk an manusia. Kalau mereka yang suk a melakukan perusakan hutan terus menerus dan bahkan secara terorganisir melaukan di fungsionalisasi hutan, maka fungsi hutan dalam menopang kem aslahan manusia menjadi hilang (Mas udi Saad, 2011: 15). Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah berik

lim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuh dan jugatanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas (Ade Irawan, *Penyebab, Akibat, dan cara Penanggulangan Kerusakan hutan*, <http://sangsurya-wahana.blogspot.com/2011/07/penyebab-akibat-dan-cara-penanggulangan.html>, akses 19 Maret 2013).

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang terdapat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan sumber daya hutan. Sumber daya hutan merupakan segala sesuatu yang terdapat di hutanyang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya hutan sangat bersifat dinamis berubah dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat yang lain. seiring dengan

perkembangan kebutuhan manusia. Sumberdaya hutan bersifat dapat diperbaharui. Sumberdaya hutan harus dilestarikan mulai dari sekarang, karena jika sumberdaya hutan tidak dilestarikan. Kelestarian alam akan terganggu. Hutan mempunyai banyak fungsi, Indonesia adalah salah satu negara dengan sumberdaya hutan terbesar di dunia. Banyak sekali spesies tanaman yang terdapat di dalam hutan Indonesia (Ade Irawan, *Penyebab, Akibat, dan Cara Penanggulangan Kerusakan hutan*, <http://sangsurya-wahana.blogspot.com/2011/07/penyebab-akibat-dan-cara-penanggulangan.html>, akses 19 Maret 2013). Fungsi hutan ini merupakan isyarat, bahwa sebenarnya kekayaan yang dianugerahkan Tuhan ini tidak boleh diabaikan instrumen memusnahkan keserakahan manusia. Kata Mahatma Gandhi, hutan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Hutan (alam) ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi ini menjadi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan manusia (A. M. Rahman, 2010: 21).

Hutan merupakan sumberdaya yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasmanutrafah, sumber hasil hutan k

Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014 Model Pemolisian Masyarakat sebagai . . . 59

ayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Namun gangguan terhadap sumberdaya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya makin meningkat (Ade Irawan, 2011: 5).

Banyak akibat negatif dari kerusakan hutan, misalnya polusi udara akibat dari kebakaran hutan, asap yang ditimbulkan mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara, perubahan iklim mikro maupun global, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanahnya, menurunnya keanekaragaman hayati (Ade Irawan, 2011: 5). Banyaknya dan beragamnya akibat ini sebenarnya menunjukkan fundamentalnya ekosistem dan fungsi hutan dalam kehidupan manusia, masyarakat, dan negara (Ahmad Zarkasi, 2010: 18). Sudah banyak kerugian yang diderita masyarakat akibat bencana alam, yang tidak hanya berupa kerugian harta benda, melainkan juga nyawa manusia. Sudah ratusan ribu nyawa manusia Indonesia

yang menjadi korban bencana alam. Bencana alam seperti dianggap sebagai kejadian rutin yang sudah sulit terelakkan atau harus diterima oleh masyarakat.

Hampir setiap musim hujan misalnya, terjadisa di sejumlah daerah di Indonesia baik banjir maupun tanah longsor. Bahkan seperti sudah menjadi kebiasaan, kalau datang musim hujan berarti datang pula musim banjir. Berbagai bentuk bencana alam ini tidak sedikit diantaranya akibat kerusakan hutan Indonesia.

Memang tidak sedikit kasus-kasus yang berkaitan dengan bencana alam yang diakibatkan oleh manusia. Manusia manusia ini telah melakukan kesalahan terhadap hutan. Mereka mendestruksi hutan dengan berbagai cara. Adanya dengan cara membakar dan menebangnya dengan melanggar hukum. Sedikitnya negara dirugikan senilai 30 Trilyun rupiah akibat pencurian ataupun pembangsan hutan (Mhammad Fauzan, 2009 : 11).

Kalau sudah termasuk kategori melanggar hukum, maka sama dengan tindak kejahatan. Tindak kejahatan ini lah yang layak di sebuts sebagai perbuatan serius manusia terhadap sumber daya, yang dampak negatifnya tidak hanya menimpakawasan hutan itu, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan secara makro terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

Terbukti, wargamasyarakat sering kali menghadapi be

ragam permasalahan yang serius sehubungan dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi terhadap kawasan hutan. Saat musim hujan, masyarakat sangat rawan menjadi korban bencana alam.

Ketika dalam keadaan tidurnya nyak di malam hari, tiba-tiba banjir datang dan mene nggelamkan rumah dan wilayahnya. Banjir ini setelah di selidiki faktor nyater nyata diakibatkan oleh kawasan hutan yang sudah rusak berat yang tidak mampu mencegah bahaya yang ditimbulkannya.

Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat menjadi tidak tenang akibat perilaku-perilaku jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka yang berusaha memenuhi kebutuhannya idupnya dengan cara merusak kawasan hutan, seperti menebang kayu hasil hutan dengan dengan cara acaraya yang tidak sah (*illegal logging*). Masyarakat dirugikan oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penjahat yang inginnya da lam

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang serba mudahnya.

Ditengah pergaulan hidupnya manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menaruh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Perbuatan menyimpang ini ada yang merugikan kehidupan masyarakat secara langsung dan jangka pendek, namun ada pula yang secara tidak langsung dan berjangka panjang. Perusakan terhadap kawasan hutan misalnya sering kali menimbulkan kerugian pada masyarakat dalam jangka panjang.

Laccasagne menyatakan, bahwa yang terpenting adalah kecadaan sosial lingkungan kita, karena lingkungan merupakan suatu wadah pembenihan untuk kejahatan dan kuman adalah penjahatnya. Demikian pula G. Tardem menyatakan bahwa kejahatan bukanlah gejala antropologik, melainkan gejala sosiologik dimana semua perbuatan penting manusia dilakukan karena proses peniruan

60 *Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014 Model Pemolisian Masyarakat sebagai . . .

natau imitasi, dilakukan di bawah kekuasaan contoh sebagai manakejadiankejadian didalam masyarakat anglain. Karenaitu R. Owen mengatakan, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat (Fanny Tanuwijaya, Sunardi, Abdul Wahid, 2007: 45).

Aparat yang berwenang (khususnya polisi) sangat berat menghadapi tindak kejahatan *illegal logging* yang terjadi di masyarakat, karena sudah begitu sering dan seriusnya tindak kejahatan ini menugji peranannya, yang kadang-kadang terjadi di suatu masyarakat yang tidak diduga sama sekali atau tiba-tiba di suatu wilayah yang semula kondisinya dikenal damai, ternyata terjadi tindak kejahatan pembalakan hutan.

Pembalakan hutan baik legal maupun ilegal merupakan salah satu masalah serius yang mengancam kelestarian hutan Indonesia. Kerugian akibat pembalakan hutan tersebut sangat besar baik dari segi ekonomi, aspek lingkungan hidup, ataupun aspek kebudayaan masyarakat adat terutama sekali yang dirasakan oleh sekelompok masyarakat adat yang hidupnya sangat tergantung dengan keberadaan alam.

Berdasarkan hasil penelitian *greenpeace* mencatat bahwa tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar per tahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas pembalakan hutan (Johnston, 2004). Sedangkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan menunjukkan angka Rp 83 miliar perhari sebagai kerugian finansial akibat pembalakan hutan tersebut (Ummu Nafisah, 2011: 43).

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan, bahwa kegiatan atau aktivitas eksploitasi hutan (seperti pembalakan) berpotensi mengakibatkan terjadinya erosi atau longsor. Hal ini terkait dengan keadaan kerusakan dan pematangan tanah. Informasi mengenai dampak penebangan terhadap sifat tanah sangat diperlukan untuk menentukan pengelolaan hutan yang lebih baik guna kelestarian sumberdaya hutan. Penelitian yang dilakukan pada hutan bekas tebangan berumur 5, 10, dan 30 tahun dengan pembandingan hutan primer telah dilakukan di lokasi hutan hujan tropik di Hutan Penelitian Malinau, Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis tanah serta sifat tanah yang dipengaruhi oleh penebangan hutan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis tanah termasuk dalam tanah Ultisol yang masuk dalam kategori tanah yang miskin hara. Seluruh tanah termasuk asam dan memiliki kandungan karbon, fosfor, kalium, kejenuhan basa, dan kapasitas tukar kation/ KTK yang rendah. Kegiatan penebangan berpengaruh

terhadap perubahan keasaman tanah, pH tanah (KCI), dan karbon tanah (Ummu Nafisah, 2011: 43-44).

Penelitian lain yang relevan dengan riset di Kalimantan, adalah dampak *illegal logging* di Kabupaten Bora Jawa Tengah. Hasil penelitian memperlihatkan praktik illegal logging menimbulkan dampak sosial dalam masyarakat yakni kehilangan pekerjaan akibat penjarahan hutan, konflik sosial baik antara masyarakat maupun antara masyarakat dengan Perhutani selaku pengelola hutan, munculnya sikap bermalasan bagi masyarakat, tingkat ekonomic yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Praktik *illegal logging* berdampak buruk terhadap lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan rusaknya ekosistem hutan, terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Kondisi hutan di kawasan KPH Bora mengalami kerusakan yang cukup

mengkhawatirkan. Tingkat kerusakan hutan mencapai 52% dari luas hutan di kawasan ini. Kerusakan hutan ini mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan dan punahnya satwa yang terdapat di dalam hutan. Ekosistem yang rusak ditunjukkan dengan hilangnya biodiversitas. Kerusakan hutan menyebabkan terjadinya pemanasan global sehingga satwayang berlindung di dalam nyataidak lagi memperoleh suakayang aman dan nyaman. Praktik *illegal logging* berdampak buruk terhadap ekologi. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Dengan menerapkan sistem pembagian hasil pengelolaan kayu jati, dapat diketahui bahwa kerugian yang dialami Pemda Kabupaten Blora tergolong besar baik karena penebangan kayu tidak terlaporkan maupun penghindaran pembayaran pajak (royalti). Kerugian Pemda akibat penebangan kayu tidak terlaporkan pada tahun 2003 mencapai Rp 23.630.503.088,721,-; tahun 2004 mencapai Rp 13.739.131.696.792,-; dan tahun 2005 mencapai Rp 3.603.303.918.901,-. Sementara kerugian akibat penghindaran pembayaran pajak (royalti) pada tahun 2003 mencapai Rp 17.254.224.617,227,-; tahun 2004 mencapai Rp 5.888.396.678,831,-; dan pada tahun 2005 mencapai Rp 2.005.5

Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014 Model Polisi Masyarakat sebagai . . . 61

93.087,936,-. Kerugian yang dialami oleh Pemda Kabupaten Blora tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pendapatan dari pengelolaan kayu jati sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan Pemda Kabupaten Blora harus mengeluarkan anggaran untuk menangkutkan pemanasan kawasan hutan melalui pembentukan tim koordinasi *illegal logging* yang beranggotakan dari Dinas Kehutanan, Perhutani, dan Kepolisian (Bagus Purwo Jati Noor, 2008: *Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging): Studi kasus sektor kehutanan di KPH Blora*, http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=39038&obyek_id=4, akses 24 Maret 2013).

Hasil penelitian Walhi di Sumatra Barat jugamengungkapkan, bahwa aksi pembalakan liar menyebabkan kondisi hutan di Sumatera Barat (Sumbar) sangat memprihatinkan, para pelaku pembalakan liar hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Bencana seperitana hlongsor dan banjir sering terjadi di Sumbar. Tidak sedikit korban jiwa bahkan kerugian

materi al ak ibat ula h ma nu sia t idak lagi mau men jag a hut an li ndung . Kon di si hut an di Su m ba r se ma kin mem pri ha tin ka n den gan ting k at k erusak an diperk irakan telah men cap ai 50 per sen dar i luas ar ea ya ng ada. Ter jad i n ya se jum la h ben ca na ba nj ir dan tan ah lo ng sor pa da se jum lah da er ah di Su m ba r ha mp ir se ba gi an be sa r di se ba b k an kon di si hut an k ri ti s (Ma su di Sa ad, 20 11 : 19).

Ka su s - ka su se ter se bu t di sa m pin g me ru pa k an k er u gi an be sa r ba gi ma sy a rak at dan ba ng sa a in i, ju ga se ba ga i ek sa mi na si ter ha dap ja ti di ri In don es ia se ba ga i ne ga ra huk um, k a re na sud ah j el as ba nyak pr o ble m ben ca na al am ya ng ter jad i i tu se ba ga i ak ibat da ri be r ba ga i be nt uk pe m ba la k an hut an . Se dang k an pe m ba la k an hut an in i me ru pa k an be nt uk pel ang ga ran huk um ya ng ter go lo ng se ri us. Da la m ra n ah in il ah, ide al is me huk um ber po si si di gu gat at au mi ni mal di per tan yak an.

3. Id e al is me Per li nd un g an Hu ku m Ja ne d j ri M G af fa r me ny e bu t, ba h wa

huk um da pa t di pa ha mi da la m be r ba ga i pe rspek ti f, ti da k ha ny a se ca ra pa rsial se ba ga i ke te nt u an no r ma ti f (ter tu lis), ta pi se ca ra ko mpre he ns if h ing ga a spe k re al it a s ber huk um ya ng ha ru set ia ter ha dap k e ad il an da n ke ma nu si a an . Pa da da sa r nya , huk um pro gre si f me mi li k i dua a su m si da sa r. *Pertama*, huk um ad al ah un tuk ma nu si a, bu k an ma nu si a un tuk huk um. O leh k a re na i tu, tu ju an huk um ya ng ut a ma ad al ah me m ba ha gi ak an ma nu si a se hi ng ga huk um ha ru s di da sa r k an pa da ha ti nu ra ni

. *Ke dua*, huk um me ru pa k a n in sti tu si ya ng ter us be r pro s es. Huk um bu k an ha ny a be ru pa bu ny i pa sal- pa sal ya ng fi na l, me la in k an ha ru s di ad ap ta si k an den gan kon tek s so si al ya ng di na mi s. Pa ra di g ma huk um pro gr es if t ent u t id a k bo le h di ma k nai se ca ra d angk al. Ma h k a ma h Ko n st i tu si ti da k ak an me ng u ba h ne ga ra a hu k um (*rechts staa t*) me n ja di ne ga ra ha k im (*rechterstaat*) (Ja ne d j ri M G af fa r, MK dan Huk um Pr ogr esi f , *H arian Sep ut ar In do ne sia*, 15 Me i 2012).

Di je la sk an da la m Per ti m ba n gan U U No m or 41 Ta hu n 1999 t en tan g Ke hu ta na n hu ru fa, ba h wa hut an, se ba ga i ka ru ni ad a na ma na h Tu ha ny ang Ma ha e sa ya ng di an u ge ra k kan ke pa da Ba ng sa In do ne si a, me ru pa k an ke ke ya a ya ng di ku sa i o le h Ne ga ra, me m be ri k an ma n fa at se r ba gu na ba gi u ma t ma nu si a, k a re na ny a wa ji b di sy u ku ri, di u ru s, dan di ma n fa at k an se ca ra op ti ma l, se r ta di ja ga ke le st a ri an nya un tuk se be sa r be sa r k e ma k mu ra n ra ky at, ba gi en e ra si

sekarang maupun generasi mendatang; Sedangkan pada huruf c disebutkan bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, harus memperhatikan dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional; Memperhatikan begitu besarnya kepentingan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut, seharusnya setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melindungi, dan bukannya merusak kawasan hutan, termasuk asset-aset di dalamnya seperti kayu hasil hutan.

Didalam pasal 11 angka 1 UUN omor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan dalam angka 2 disebutkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dengan berpijak pada batasan itu dapatlah dipahami bahwa kayu hasil hutan merupakan bagian kesatuan hutan. Artinya di dalam hutan atau kawasan hutan, terdapatlah produk hutan, sebagai . . .

ada sumber daya alam di dalamnya, diantaranya berupa kayu atau pepohonan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan alam semesta itu sendiri. Di dalam kawasan hutan, terdapat hasil alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan ukuran kebutuhan manusia. Namun ketika kebutuhan manusia ini terlupakan, maka hal ini dapat mengakibatkan kehidupan manusia dan alam itu sendiri.

Selain itu, dengan ketentuan tersebut, jelas menunjukkan mengenai persoalan hubungan manusia dengan hutan, termasuk pengelolaan hutan. Persepsi hutan sebagai salah satu sumber pendapatan dari sumber daya alam nasional memiliki makna dan peran yang sangat besar pengaruhnya terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan berdimensi luas dan multidisiplin. Pengelolaan hutan merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan. Sedangkan, pelaksanaannya pengeloan

hutan dan hasil hutan diatur ke dalam sistem pengusahaan hutan berdasarkan hukum nasional. Hukum nasional yang dimaksud adalah sebagian besar merupakan *hukum tertulis* dan sebagian lainnya merupakan *hukum tidak tertulis*, yakni hukum adat. Ketika dikatakan dengan hukum tidak tertulis, apa lagi dalam pengelolaan hutan, maka posisi masyarakat, terutama di sekitar kawasan hutan menjadi sangat penting (Nailul Muhtarom, 2012 : 22). Selain itu, masyarakat yang sudah menjalanakan aktifitas cukup lama di sekitar kawasan hutan merupakan kekuatan sosial yang mempunyai hak dalam pengelolaan atau menikmati (memanfaatkan) hasil hutan.

Kalaupun idealisme perlindungan hukum nasional menempatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan sebagai subyek hukum tidak tertulis atau bagian dari masyarakat adat atau diakui sebagai masyarakat adat, yang kemudian idealisme ini terimplementasikan secara demokratis dan humanistik, maka wajah hukum nasional ini layak dikatakan memasukkan unsur hukum progresif.

Penghormatan terhadap *rule of law* dan HAM, merupakan salah satu indikator terpenting dari demokrasi dan *good governance*. Demikian pula, *rule of law* sangat berhubungan dengan penggunaan otoritas dan kekuasaan negara secara tepat. *Rule of law* menetapkan kannilai dan standar substantif bagi pemerintah dan

mengamalkan pelaksanaan pengawasan kekuasaan yang sewenang-wenang (Todung Mulya Lubis, 2005 : 25). Dalam ranah idealitas perlindungan hutan dan pengelolaan oleh masyarakat di sekitarnya hutan terwujud, maka penghormatan terhadap *rule of law* dan HAM akhirnya tidak menjadi idealitas di atas kertas.

Abdul Rokhim menyebutkan, bahwa hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada suatu orang tertentu dalam rangka kepentingan orang tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai *hak* (Hikam Hamdi, 2011 : 91). Suatu kepentingan merupakan sarana dari hak, bukan hanya karena ia *dilindungi* oleh hukum, tetapi juga karena adanya *pengakuan* terhadapnya. Paton berpendapat, bahwa hak itu ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan,

melainkan juga kehendak. Apabila seseorang memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada orang tersebut untuk mempergunakan atau menikmati tanah tersebut sesuai dengan kepentingan dan kehendaknya, dan untuk semua hal itu ia akan menandatangani perjanjian hukum (*recht sbe s cher min g*).

Sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*), dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam nasional, termasuk dalam bidang kehutanan, negara atau pemerintah Indonesia semestinya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atau warga negara yang hidup atau tinggal di dalam atau disekitar hutan. Karena, pada hakikatnya tujuan utama pengelolaan sumber daya alam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Hikam Hamdi, 2011: 92).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya *di kuasai* oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan mengandung arti w

Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014 Model Pemolisian Masyarakat sebagai . . . 63

wenang dalam hukum publik. Dalam konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*; *authority*) berkaitan dengan kekuasaan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Sedangkan, dalam hubungannya dengan obyek hukum (dalam hal ini hutan), istilah dikuasai mengandung arti pemerintah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam itu.

Dibidang pengelolaan hutan, rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai bukan dimiliki oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara sebagai mana tersebut diatas, memberi wewenang kepada pemerintah untuk: a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukaan kawasan hutan; c. Mengatur dan menetapkan

hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan perbuatan hukum mengenai kehutanan (Hikam Hamdi, 2011 : 93).

4. Model Pemolisian Masyarakat (*community policing*)

Polisi memang memiliki tugas besar untuk melindungi dan melayani masyarakat. Dipevndaknya lahrasamandan k eter tiban masyarakat dititipkan. Namun rasio atau perbandingan jumlah polisi dan masyarakat masih jauh dari ideal. Dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 1995 sampai tahun 2000 rasio polisi dan masyarakat adalah 1:1 000. Sedangkan pada tahun 2000-2005 rasio tersebut membaik yakni 1:700. Artinya 1 orang polisi harus melayani sekitar 700 orang masyarakat. Padahal rasio ideal menurut ketentuan PBB adalah 1:450. Sebagai perbandingan, di Jepang rasio jumlah polisi dan masyarakat adalah 1:520 dengan tingkat kejahatan rata-rata 2 juta kasus setiap tahun. Kebanyakan dari kasus tersebut adalah pencurian dan perampokan (Syamsul Maarif, *Kriminalitas dan Perpolisian Masyarakat*, <http://syamsulbandung.wordpress.com/2010/02/08/kriminalitasdan-perpolisian-masyarakat/>, akses 13 Maret 2013). Salah satu jenis obyek yang dicuri atau dijarah adalah kekayaan hasil hutan. Mudahnya terjadi penjarahan atau pembalakan diantaranya disebabkan oleh keterbatasan perpolit.

Berdasarkan Peraturan Kapolri

nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dan strategi dan implementasi pemolisian masyarakat, dikenal istilah *community Policing* yang diterjemahkan menjadi Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat yang disingkat Polmas. Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasarkan kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Oleh karena itu dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban ini harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat, dengan cara memberdayakan masyarakat melalui ikmitaan Polisi dan warga masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah dipahami, bahwa peran pemolisian masyarakat merupakan model landari pemberdayaan masyarakat. Kalau sebelumnya, masyarakat lebih sering mendapat insiden, maka

dengan pemolisian masyarakat ini, perannya harus ditunjukkan oleh masyarakat adalah peran subyek. Dengan berpijak pada kondisi ini, maka permasalahan pembalakan hutan bukan semata-mata menjadi permasalahan polisi, tetapi juga permasalahan masyarakat.

Sebagai suatu falsafah, pemolisian masyarakat mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan alam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga. Tujuan yang adalah menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi dimensi yang sebelumnya tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan masyarakat semakin hebat pula metode, teknik dan cara-cara tindakan kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Untuk itu perlu adanya suatu upaya untuk mencegah tindakan kejahatan tersebut sebagai upaya menekan laju kejahatan, baik secara preventif, preventif maupun kuratif, yaitu pencegahan dan penangan

64 *Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014 Model Pemolisian Masyarakat sebagai . . .

nan. Tidak ada kejahatan yang terlepas dan terpisahkan sebagai alih dari lingkungan masyarakatnya. Tingginya tingkat kejahatan memerlukan penanganan yang serius dengan didukung oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang di sertai jumlah peradilan yang memadai. Untuk membantu tugas kepolisian dalam memerangi kejahatan diperlukan suatu peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat diwujudkan dalam suatu kerjasama kemitraan melalui Pemolisian Masyarakat (Irwan, 2011, *Peran Pemolisian Masyarakat (Polmas) Kota Metro Dalam Mendukung Penegakan Hukum*, <http://repository.unila.ac.id/8180/pace/handle/123456789/3159>, akses 12 Maret 2013). Pembalakan hutan merupakan salah satu jenis kejahatan istimewa (*extraordinary crime*), yang tidak cukup polri yang mengatasinya, tetapi masyarakat juga berkewajiban memoli si kan diri nya ber s ama s a m a d e n g a n a p a r a t k e p o l i s i a n . S e b a l i k n y a , a p a r a t k e p o l i s i a n p u n t i d a k a k a n m a m p u m e n j a l a n k a n p e r a n n y a d e n g a n m a k s i m a l , a p a l a g i d a l a m p e n a n g g u l a n g a n p e m b a l a k a n

hutan, tanpa membangun harmonisasi hubungan kemitraan dengan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan.

Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luas yang cukup dan sebar yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencukupi manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang selaras dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ketentuan tersebut sudah jelas menunjukkan, bahwa keberdayaan masyarakat secara partisipatif menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kehutanan. Salah satu pilar penyelenggaraan kehutanan adalah masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai

pihak yang berhak memanfaatkan sumber daya hutan, tetapi juga sebagai pengawas atau pelindungnya. Kasus kerusakan hutan di Batuakibat pembalakan liar menjadi contoh, bahwa kepolisian membutuhkan dukungan riil masyarakat untuk mengatasinya.

Selain itu, kepolisian Indonesia dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005, menyatakan pemolisian masyarakat pada hak ekatnya mengandung 2 (dua) unsur utama yaitu: 1) membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat. 2) menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal. Sebagai suatu falsafah, Polisi masyarakat mengandung makna (suatu model kepolisian yang menekankan

hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/ke manusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat)(Elia Umbah, 2012, *Laporan hasil Pelatihan JICA Account Representative Training Course*, akses 13 Maret 2013).

Modus operasi dikehutanan pembalakan hutanyang semakincanggih dan terorganisir, membuat fungsi kepolisian senyatanya membutuhkan dukungan riil dari masyarakat. Polisi tidak akan mampu mengandalkan kemampuannya sendiri yang serbaterbatas dalam penanggulangan pembalakan hutan. Model keemitraan antara polisi dengan masyarakat dengan cara memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melaksanakan sebagai peran pemolisian akan dapat mencegah kejahatan pembalakan hutan menjadi semakin serius dan memperhatikan.

d. Simpulan Pemolisian masyarakat merupakan salah satu model strategis yang bisa dig

Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014 Model Pemolisian Masyarakat sebagai . . . 65

gunakan untuk menanggulangi pembalakan atau penebangan hutannya secara liar (*illegal logging*). Model pemolisian masyarakat merupakan model keemitraan yang dibangun oleh kepolisian untuk menempatkan masyarakat sebagai subyek sosial guna mengamankan atau melindungi kawasan hutan dari ulah penjahat yang bermaksud mencuri hasil-hasil hutan dengan cara melakukan penebangan hutan.

Pemolisian masyarakat itu merupakan bukti, bahwa dalam penanganan gangguan kriminalitas yang sudah merugikan bangsa dan negaraini, aparat tidak cukup memadai jika hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Kehadiran peran masyarakat untuk menjaga atau melindungi kawasan hutan akan membuat penjahat yang bermaksud melakukan pembalakan hutan akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan kebutuhannya itu, maka diperlukan sikap aktif aparat kepolisian dalam membangun sistem kemitraan yang terbuka, kuat, dan profesionalisme dengan masyarakat, bukan sekedar mengajak masyarakat berkoordinasi di bidang pengamanannya. Masyarakat juga mempunyai hak-hak atas pemanfaatan kekayaan hutan, sehingga sejak awal, hal ini harus di edepankan.

daftar Pustak a

Ano ni m. 2004. Undan g- und ang Re pu bl ik Indon es ia No mor 19 tah un 2004 te nta ng Keh uta nan. . 1999. Unda ng- un dan g Re pub lik Indon es ia N om or 41 Tah un 1999 te nta ng Keh ut anan .

Ade Ir aw an. 2013. *Pen ye b ab, A ki bat, dan c ar a P ena nggu la nga n Ker u sa ka n hu t a n*, [http://sangsur yawahana.blogspot.com/2011/07/penyebab-akibat-dan-carapenangulangan.ht ml, akses \[19 Mar et\]](http://sangsur yawahana.blogspot.com/2011/07/penyebab-akibat-dan-carapenangulangan.ht ml, akses [19 Mar et])

1 hm ad Z ar k asi. 2010. *Ma s ih kah hu t a n Un t uk Ba ng sa*, Sur a ba ya: LP KP H I. AM. Rahman. 2010. *Eksplor asi Bumi Menjadi Akar Penyebab Maraknya Bencana Alam*. Malang: y a yasan

1 Per ma ta H ati. Bagus Purw o Jati Nor. 2008. *Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging)*:

Stu di kasus se k tor ke hu t a n a n di K Ph B l o r a, [http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=ht ml &buk u _id=39038 &ob yek _id=4, akses \[24 Mar et 2013\]](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=ht ml &buk u _id=39038 &ob yek _id=4, akses [24 Mar et 2013])

eli a U m boh. 2012. *Lap or an h a s i l Pe lat i ha n JI c A c ou n ter par t Tr ai ni ng c o ur se*. akses [13 Mar et 2013] F ann y Tanuw i ja ya, Su nar di, dan A bdu l W ahid. 2007. *Re pub li k Ka u m Ti kus*.. Jak ar ta: e ds a Ma hk ota. H ik am Ham di. 2011. *Q uo Vadi s h u k u m y ang Me li ndu n gi Ke ka ya a n hu t a n*. Jak ar ta: P ust ak a Ilmu. Imam Ka bu l. 2007. *h u k u m Ek o lo gi (Per spe kt if Mu lt i di men si)*. Jak ar ta: N ir ma na Me di a. Ir w an. 2011. *Per an Pe mo li si an Ma s yar a kat (Pol ma s) Ko ta Metr o D al a m Men du kun g Pen ega ka n h u k u m*.

<http://repositori.unila.ac.id:8180/dspace/handle/123456789/3159>, akses 12 Mar et 2013. Jan ed jr i M G a ff ar. 2012. *MK dan h u k u m Pro gr es if, h a r i a n Sep utar Indo ne si a*, 15 Mei 2012. Lub is, To dun g, Mul ya. 2005. *J al an Pan ja ng h a k As a si Ma n u s i a*. Jak ar ta: G r a m e di a. Mas u di Sa ad. 2011. *K r i m i n a l i s a s i hu t a n : Ke ka lah an Ne gar a*. Jak ar ta: Pr o gr es if Me di a. M o h a m m a d F a u z a n. 2009. *Nes ta pa Indo ne si a A ki bat De fo re st a si*. Sur a ba ya: Ma s ya ra k at Pe ci n ta

Indo ne si a. Mu ti a ra Sal ma. 2012. *hu t a n Tan pa ha ra pa n*. Jak ar ta: Le m ba ga Ka j i a n St ra te gi s Pen ye la ma ta n

Sum ber da ya Ba ng sa (LK S PS B). N ai lul Mu ht a r o m. 2012. *h u k u m y ang Men ye la ma t kan hu t a n*. Sur a ba ya: Pr e ss i n d o. Sy a m s ul Ma a r i f. *K r i m i n a l i t a s dan Per po li si an Ma s ya ra k at*, <http://syamsulbandung.wordpress.com/2010/02/08/kriminalitas-dan-perpolisian-masyarakat/>, akses [13 Mar et 2013] U mmu N a f i s a h. 2011. *A kar Pen ye bab dan Da m pa k Pe r u sa ka n hu t a n*. M al ang: y a y a s a n Per ma ta H a t i.

66 *Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014 M ode l P e m o l i s i a n Ma s ya ra k at sebagai . . .

Model pemolisian

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.uns.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 50 words